



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI PROGRAM KEBERSIHAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Niko raynalto

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi,
Jl gatot Subroto, Km 7 Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan
Singingi, Riau
Email : nikoajja0493@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Permasalahan yang ditemukan adalah masih terdapat program yang dilaksanakan tetapi belum lancar dalam pelaksanaan dan menjalankan program-program tersebut. Seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah.

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan. informan terdiri dari 8 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci : Implementasi, Program Kebersihan

ABSTRAC

This study aims to determine the implementation of the cleaning programs in the environmental service, Kuantan Singingi regency. The problem found is that there are still programs that are implemented but not yet smooth in the implementation and implementation of these programs. Like there are still many people who littering, even though garbage disposal has been provided.

The method of this research is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative descriptive research is a study that aims to describe and describe events and phenomena that occur in the field and present data in a systematic, factual, and accurate manner regarding the facts or phenomena that occur in the field. Key informants consisted of 8 people. Data collection is done by observation, interview, documentation techniques. The researcher used source triangulation to check the validity of the research data. Data analysis in this study uses four components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

Keywords: Implementation, Cleaning Programs



1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan sampah tidak lepas dari adanya aktivitas manusia di berbagai sektor. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Masyarakat masih beranggapan bahwa sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, sehingga banyak yang membuang sampah tanpa dikelola dengan baik yang mengakibatkan timbulnya pencemaran. Sampai saat ini permasalahan sampah belum ditangani dengan baik.

Semakin bertambahnya penduduk Indonesia yang diiringi dengan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan bertambahnya volume sampah dan jenis sampah yang beragam, antara lain sampah kemasan yang berbahaya dan/atau yang sulit diurai oleh proses alam. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang menimbulkan bau yang tidak sedap, mengurangi tingkat kesuburan tanah dan menghambat sirkulasi tanah, serta menghambat aliran air.

Pencemaran lingkungan sebagai akibat dari pengelolaan sampah yang kurang baik, berdampak buruk pula bagi kesehatan, sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga pemerintahan sangat penting dalam mengelola sampah agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Selain peran Dinas Lingkungan Hidup, peran masyarakat juga diperlukan dalam mengurangi dan mengelola sampah. Perlu diingat bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, yang diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan menunjang hidup rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup. Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berkelanjutan, memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam yang sesuai dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

Salah satu faktor penghambat dalam penanganan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan mengelola sampah. Banyak pula masyarakat yang enggan membuangnya ke tempat sampah, tetapi justru membuangnya ke sungai atau di pinggir jalan. Hal ini tentu saja berpengaruh pada baku mutu air, karena air sungai menjadi sumber Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam distribusi air bersih di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, kebiasaan membuang sampah ke drainase menyebabkan tersumbatnya aliran air sehingga apabila hujan akan terjadi banjir, maka diperlukan penataan ulang drainase dan menghilangkan kebiasaan membuang sampah sembarangan.

Permasalahan lingkungan di kabupaten kuantan singingi semakin lama semakin kompleks dan menimbulkan berbagai dampak negative terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Permasalahan lingkungan hidup tersebut antara lain kebakaran hutan dan lahan, potensi bencana alam seperti banjir, penambang emas tanpa izin (PETI), penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara, timbulan sampah dan limbah B3, permasalahan lain yang bersifat global, adalah perubahan iklim (*climate change*), efek rumah kaca (*green house effect*) dan penipisan ozon (*ozone depletion*).



Berbagai permasalahan lingkungan hidup diatas telah menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup padahal lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak asasi setiap anggota masyarakat di kabupaten kuantan singing.

Dalam rangka mengatasi hal hal tersebut diatas, dians lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi perlu menyusun rencana strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama sama antara pimpinan untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran sesuai tugas pokok, fungsi kewenangan secara efektif, efisien, dan produktif.

Adapun program kebersihan yang merupakan urusan wajib di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Berdasarkan pengamatan peneliti ditemukan beberapa permasalahan mengenai pelaksanaan program kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi masih terdapat program yang dilaksanakan tetapi belum lancar dalam pelaksanaan dan menjalankan program-program tersebut. Seperti masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan, padahal sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Hal tersebut menyebabkan terjadinya banjir. Misalkan saat musim hujan seperti sekarang ini, selokan tidak bisa lagi menampung air karena tersumbat oleh sampah dan mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa lokasi. Terutama di Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul **“Implementasi Program Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah **“Bagaimana Implementasi Program Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi (studi kasus Kecamatan Kuantan Tengah).”**

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Implementasi Program Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian



1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum lingkungan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai bahan masukan untuk membuat suatu Peraturan Daerah guna meningkatkan pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Dinas Lingkungan Hidup. sebagai bahan masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penanganan dan pengelolaan kebersihan khususnya dalam hal sampah.
- c. Masyarakat, sebagai bahan informasi untuk memperluas wawasan mengenai hukum lingkungan, sehingga diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar dan berperan aktif dalam menjaga dan mengelola lingkungan.

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori /Konsep Administrasi Negara

Administrasi Negara adalah suatu sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk mengatur proses pengelolaan organisasi masyarakat sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam bahasan ilmu sosial yang ada pada administrasi negara, terdapat tiga elemen penting yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Pada dasarnya administrasi melingkupi seluruh kegiatan dari pengaturan dan pengurusan sekelompok orang yang memiliki differensiasi pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Administrasi dapat berjalan dengan adanya banyak orang yang terlibat di dalamnya. Hal ini sesuai dengan pengertian administrasi yang dapat dibedakan menjadi dua bagian yang di kemukakan oleh Irra Chisyanti Dewi (2011 : 3) dalam buku administrasi negara sebagai berikut :

Administrasi dalam arti luas, yaitu proses kerja sama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansipemerintahan atau perusahaan sangat di perlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan berjalan dengan baik (Syafii,2009: 15).

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Hasibuan (2011 : 120) mengatakan bahwa Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan berkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

Pradjudi Atmosudiro (2014 : 51) mengemukakan bahwa Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek penting dari definisi diatas adalah :

1. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
2. Adanya sistem kerja sama yang berstruktur dari sekelompok orang



3. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan
4. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi

Adapun Unsur-unsur organisasi, yaitu :

1. Manusia (*human factor*), artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pemimpin dan ada yang dipimpin (bawahan).
2. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada, jika ada tempat kedudukannya.
3. Tujuan, artinya organisasi baru ada, jika ada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pekerjaan, artinya organisasi itu baru ada, jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
5. Struktur, artinya organisasi itu baru ada, jika ada hubungan dan kerja sama antara manusia yang satu dengan yang lainnya.
6. Teknologi, artinya organisasi itu baru ada, jika terdapat unsur teknis.
7. Lingkungan, artinya organisasi baru ada, jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Penetapan hubungan dalam suatu organisasi merupakan salah satu syarat terciptanya kerja sama (*team work*), antara karyawan dengan karyawan, dan antara departemen dengan departemen.

Hubungan-hubungan ini dalam suatu organisasi dapat digolongkan atas :

1. *Line relations* (hubungan lini)
2. *Functional relations* (hubungan fungsional)
3. *Staff relations* (hubungan staf)
4. *Coordination relations* (hubungan koordinasi)

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian” (Widodo, 2001:192).

Definisi di atas, menekankan bahwa implementasi tidak hanya melibatkan perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh dan berdampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan dari suatu program. Dunn mengistilahkannya implementasi secara lebih khusus, menyebutnya dengan istilah implementasi kebijakan dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*. Menurut Dunn implementasi kebijakan (*Policy Implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn, 2003:132).

Berdasarkan pengertian di atas implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik* menjelaskan pengertian implementasi kebijakan, sebagai berikut :

“Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama



untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno, 2005:101).

Berdasarkan pendapat Winarno tersebut, implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses keluaran (*output*) maupun hasil, yang melibatkan aktor, organisasi prosedur dan teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pendapat Budi Winarno tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho Dwijowijoto dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

2.1.4 Teori/Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Sonny Sumarsono (2003:4), Sumber Daya Manusia (*Human Resources*) menurut beliau memiliki dua arti yang berbeda diantaranya adalah SDM merupakan suatu usaha kerja atau jasa yang memang diberikan dengan tujuan dalam melakukan proses produksi. Dengan kata lain Sumber Daya Manusia adalah kualitas usaha yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu guna menghasilkan jasa atau barang.

2.1.5 Teori/Konsep Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi secara umum adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja (baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi). Lebih tepatnya perilaku individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku terhadap individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yaitu sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem.

Toha (2001), berpendapat bahwa yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu.

Robbin SP (2001), berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki dampak perorangan, kelompok dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi.

2.1.6 Teori/Konsep Masyarakat

Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup, yaitu sebagian besar interaksi individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Istilah masyarakat umumnya mengacu pada sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas teratur.

Menurut Selo Soemardjan, mengatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Karl Marx,



mengatakan bahwa masyarakat sebagai suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis. Menurut Max Weber, mengatakan masyarakat sebagai suatu sistem dari cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks dan selalu berubah dari relasi sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti dibawah ini.

1. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang
2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama. Timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
3. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

2.1.7 Teori / Konsep Sampah

Menurut definisi *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya (Chandra, 2006). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berasal dari kegiatan manusia, hewan dan alam.

Sampah yang berasal dari kegiatan manusia, hewan dan alam akan mengakibatkan timbunan sampah di tempat sampah ataupun TPA. Timbunan sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan beragamnya aktifitas ditengah semakin terbatasnya lahan merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir sebagian kota-kota besar (Purnama & Ciptomulyono, 2011). Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan, sampah dapat dikatakan sebagai masalah kultural karena dampaknya terkena pada berbagai sesi kehidupan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, Palembang, dan Medan (Sudrajat, 2006).

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah : jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi (Sulistiyorini, 2005).

2.1.8 Teori / Konsep Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).



Istilah Lingkungan Hidup pada BAB I, pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada diluar suatu organisme, meliputi:

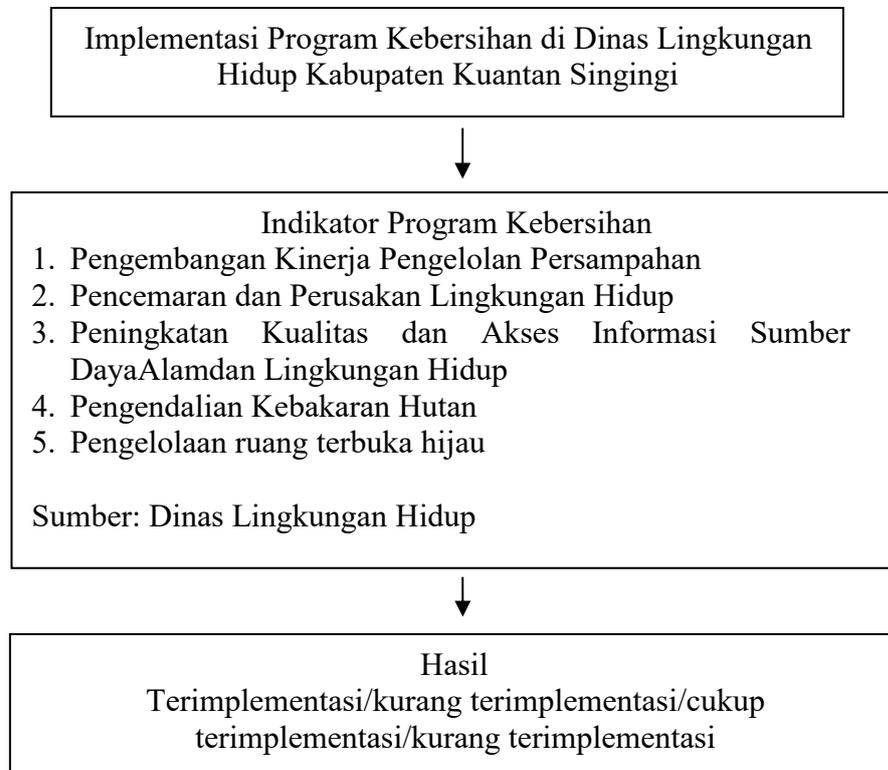
- (1) Lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan diluar organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya.
- (2) Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam rusng dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber Data: Modifikasi Peneliti 202

3.1 Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini adalah survei, dengan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif.

Survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel. (Sugiyono, 2016:7)

Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2016:11)

Kualitatif adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. (Sugiyono, 2016:15)



5.1 Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangn.

5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Tentang Implementasi Program Kebersihan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi

Program kebersihan di dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi di antara nya adalah

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Semua program di atas belum berjalan dengan baik, sehingga peneliti akan membahas mengenai empat program tersebut diantara nya adalah

5.2.1 Tanggapan Informan mengenai Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Berikut ini merupakan Tanggapan Informan mengenai Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Oleh Bapak Syafrianto, A.md sebagai Kasi Pengelolan Sampah dan TPA.

- a. Apa saja yang termasuk ke dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini Pak?

“Yang termasuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan yaitubank sampah unit, bank sampah induk, TPS 3R, komposting/rumah kompo), penanjanan TPA” (Wawancara langsung 14 Juli 2020 jam 11.00 WIB)

- b. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini pak?

“Hambatan program pengembangan kinerja pengelolaan sampah ialah susahnya pembinaan masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan masalah persampahan” (Wawancara langsung 14 Juli 2020 jam 11.00 WIB)

- c. Menurut bapak program ini sudah berjalan dengan sangat baik, atau cukup dan atau kurang baik (pilih salah satu) mohon bapak/ibu untuk memberikan alasannya?

“Menurut saya program ini sudah berjalan dengan cukup baik, karna sebagian besar program ini sudah berjalan sesuai mestinya, tinggal kita



menerapkan dan mensosialisasikan tentang kebersihan dan menjaga lingkungan supaya tetap bersih di masyarakat kita” (Wawancara langsung 14 Juli 2020 jam 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di dinas lingkungan hidup kegiatannya meliputi penyediaan peralatan kebersihan, pembersihan drainase ibukota kabupaten, pembersihan drainase ibu kota kecamatan, dan pembersihan sampah pacu jalur, pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan TPA danyang termasuk ke dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan ini adalah bank sampah unit, bank sampah induk, TPS 3R, komposting/ rumah kompos, jenis sektor informal (penepuk/lapak), penanjanan TPA. Hambatan yang di alami dalam program pengembangan kinerja pengelolaan sampah ini yaitu susahnya pembinaan masyarakat dan kurangnya masyarakat dalam pengelolaan masalah persampahan Sulitnya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Hari kerja. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah secara mandiri masih sangat rendah. Kebanyakan masih belum tahu dan enggan melakukan proses pemisahan sampah, reduksi, dan pemakaian ulang sehingga penerapan program ini kurang berjalan dengan cukup baik karena masih ada terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan programnya.

Kegiatan ini merupakan salah satu program yang memanfaatkan sinergi dari berbagai elemen baik itu sektor swasta, media, LSM, pemerintah lokal dan yang paling penting komponen masyarakat itu sendiri. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ini dimaksudkan untuk mengendalikan dampak pembangunan sampah terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan kegiatan-kegiatan yaitu sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan serta kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Persepsi masyarakat saat ini mengenai keberadaan TPA pada umumnya masih negatif, jadi masyarakat memandang TPA hanya sebagai upaya membuang sampah tanpa ada upaya proteksi terhadap lingkungan dan upaya-upaya perbaikan lainnya. Seiring dengan pembahasan RUU Persampahan, ada upaya untuk mengubah persepsi tersebut dengan mendefinisikan TPA sebagai Tempat Pemrosesan Akhir, sehingga peran TPA tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah tetapi juga ada upaya pengolahan/pemrosesan, dan pembuangan hanya merupakan alternatif terakhir setelah tidak ada alternatif pengolahan lainnya yang dapat dilakukan.

5.2.2 Tanggapan Informan mengenai Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup kegiatannya meliputi Pengawasan penataan Lingkungan Hidup, Pembinaan properda, Pemantauan kualitas udara, dan Pengendalian dampak kerusakan lingkungan akibat PETI. Program



Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari tugas inventarisasi data dan sistem informasi lingkungan hidup yang memiliki rincian tugas yaitu Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan inventarisasi data dan sistem informasi lingkungan hidup, Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi inventarisasi data dan sistem informasi lingkungan hidup, Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis inventarisasi data dan sistem informasi lingkungan hidup, Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan inventarisasi data dan sistem informasi lingkungan hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, Menyiapkan bahan penyusunan dokumen rpplh, Menyiapkan bahan pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan rpplh dalam rpjp dan rpjm, Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rpplh, Menyiapkan bahan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, Menyiapkan bahan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (pdb & pdrb hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup), Menyiapkan bahan pensinkronisasian rpplh nasional, roplansi dan ekoregion, Menyiapkan bahan penyusunan nsda dan lh, Menyiapkan bahan penyusunan status lingkungan hidup daerah, Menyiapkan bahan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup, Menyiapkan bahan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang rpplh, Menyiapkan bahan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis kabupaten, Menyiapkan bahan pengesahan kajian lingkungan hidup strategis, Menyiapkan bahan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan klhs, Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan klhs, Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi klhs, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup ini yaitu mengenai pendanaan, kapasitas dan kemampuan PNS yang ada, Kebijakan Pemda yang belum mendukung sehingga penerapan program ini dikategorikan cukup baik karena masih terhambat dana dan kemampuan SDM serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta kebijakan pemda yang belum mendukung.

Strategi pengelolaan lingkungan hidup haruslah diterapkan dengan baik agar perubahan lingkungan hidup dapat di tahan selama mungkin dan tentunya hal ini harus dilakukan dengan disiplin yang tinggi juga. Pengelolaan Lingkungan Secara Rutin dilihat dari pengelolaan lingkungan yang kurang maksimal Karena kurangnya peran serta masyarakat. Perencanaan lingkungan lebih awal dilihat dari cara mensosialisasikan kepada masyarakat tentang permasalahan lingkungan, agar mereka cepat mengajukan program lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan dampak yang akan terjadi dapat dilihat dari pengelolaan limbah untuk memperkecil dampak pada lingkungan, mengelola sampah menjadi kompos hampir tidak ada dampak negative pada pengelolaan limbah tersebut. Pengelolaan lingkungan untuk perbaikan dapat dilihat dari pengelolaan sampah atau limbah menjadi kompos, agar tidak terjadi pencemaran udara akibat sampah yang tidak diolah dan tidak menyebarkan penyakit ke lingkungan masyarakat.



5.2.3. Tanggapan Informan mengenai Program Pengendalian Kebakaran Hutan

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai Program pengendalian kebakaran hutan kegiatannya meliputi Pengendalian kerusakan lahan akibat Karhutla, Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, dan Pembinaan desa bebas asap Kab. Kuantan Singingi dan yang termasuk ke dalam program Pengendalian Kebakaran Hutan yaitu Monitoring lahan dan hutan yang terbakar, koordinasi dan konsultasi ke provinsi dan pusat, pemantauan hotspot setiap hari melalui lahan, BMKG, NOAA, dll, dan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan, koordinasi dan konsultasi dengan pihak yang terkait. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program Pengendalian Kebakaran Hutan diantaranya adalah Pendanaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan membakar sehingga penerapan program Pengendalian Kebakaran Hutan dikategorikan Cukup baik.

Penanganan masalah kebakaran hutan yang terfokus pada pemadaman dan teknologi semata ternyata tidak mampu menghentikan kejadian kebakaran yang datang setiap tahun. Dalam kenyataan di lapangan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan lahan berdasarkan aspek sosial ekonomi dan budaya, kelembagaan dan kebijakan pemerintah juga memegang peranan penting dalam pengendalian kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia umumnya disebabkan oleh faktor manusia. Oleh karenanya peran serta masyarakat dalam pencegahan kebakaran akan mengurangi munculnya kebakaran hutan dan lahan. Kelompok yang paling dirugikan oleh adanya kebakaran hutan dan lahan umumnya adalah masyarakat yang tinggal di lokasi kebakaran. Oleh karenanya sudah sewajarnya bila mereka terlibat secara aktif dalam upaya pengelolaan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat mempunyai potensi sumberdaya (tenaga, natura/barang) yang sangat besar untuk menunjang kegiatan pengelolaan kebakaran sebagai pelengkap dari sumberdaya Pemerintah yang masih terbatas. Masyarakat biasanya banyak berdomisili di daerah-daerah yang berdekatan dengan areal rawan kebakaran sehingga mereka sangat potensial untuk melakukan serangan dini (initial attack) dalam pengendalian kebakaran. Initial attack tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran besar dan luas. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengendalian kebakaran berbasis masyarakat di sekitar hutan dan lahan merupakan pola alternatif pengelolaan kebakaran yang menjanjikan karena kejadian kebakaran selama ini banyak dipicu oleh kebiasaan pembakaran lahan masyarakat berskala kecil tetapi banyak, yang dilakukan setiap tahun di desa-desa dan ladang sekitar hutan.

5.2.4 Tanggapan Informan mengenai Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kegiatannya meliputi Pengadaan sarana informasi pengaduan masyarakat/website (SPM), Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pengadaan papan informasi



Lingkungan Hidup, Pemantauan dan penyusunan laporan kualitas air. Dan yang termasuk ke dalam program peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup yaitu Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program peningkatan Kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup yaitu Kurangnya sosialisasi, waktu yang terbatas, data yang tidak tersedia sehingga dalam pelaksanaannya, program ini di kategorikan Cukup baik.

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah dan Dokumen Menuju Indonesia Hijau (Tutupan Vegetasi) Kabupaten Kuantan Singingi.

5.2.5 Tanggapan Informan mengenai Program pengelolaan ruang terbuka hijau

Dari hasil wawancara dan observasi mengenai Program pengelolaan ruang terbuka hijau kegiatannya meliputi pemeliharaan sarana dan prasarana pertamanan, pengadaan sarana dan prasarana pertamanan, pengelolaan kinerja tenaga pertamanan, pembuatan bibit tanaman pertamanan. Hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program pengelolaan ruang terbuka hijau yaitu sumber daya manusia dan dana yang masih terbatas sehingga menghambat proses pengelolaan sarana dan prasarana pertamanan sehingga kategori dalam pelaksanaan program ini yaitu cukup baik.

Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan saat ini merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dipecahkan di Kota-kota besar. Masalah RTH terjadi karena adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya, sehingga ruang hijau tersebut cenderung mengalami konversi guna lahan menjadi kawasan terbangun yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Sebagian besar permukaannya, terutama di pusat kota, tertutup oleh jalan, bangunan dan lain-lain dengan karakter yang sangat kompleks dan berbeda dengan karakter ruang terbuka hijau. Pada umumnya dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup. Menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik yang ada di perkotaan, baik berupa ruang terbuka hijau (RTH), telah mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan seperti seringnya terjadi banjir di perkotaan, tingginya polusi udara, dan meningkatnya kerawanan sosial (kriminalitas dan krisis sosial), menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress karena terbatasnya ruang publik yang tersedia untuk interaksi sosial. Dengan kata lain, keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan, karena Ruang Terbuka Hijau mempunyai tujuan dan manfaat yang besar bagi keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri. Saat ini pentingnya membangun kota hijau di tengah kota oleh karena itu kebijakan mendasar dan komitmen kuat untuk membangun yang memungkinkan kota berkelanjutan (kota hijau). Pengelolaan kota dapat digambarkan sebagai sekumpulan kegiatan yang bersama-sama membentuk dan mengarahkan pada bidang sosial, fisik dan perkembangan ekonomi kota (Hakim, 2008 : 29). Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap



perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH (Hakim, 2008 : 32) yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Kewajiban pemerintah kota, mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keselarasan. Apabilahal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau produktif yang meliputi kawasan pertanian kota, perairan/tambak. Ruang terbuka hijau konservasi yang meliputi kawasan cagar alam dan hutan kota. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota. Ruang terbuka hijau khusus meliputi kawasan pemakaman, perkantoran dan kebun binatang.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang implementasi program kebersihan di dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi maka program yang terdapat di dinas lingkungan hidup itu terdapat lima program yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Kebakaran Hutan, Program pengelolaan ruang terbuka hijau.

Hambatan atau permasalahan tersebut di antaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai masalah persampahan sehingga sebagian kecil menjadi kendala melaksanakan program dan salah satu contohnya yaitu komposting yang dikelola oleh kelompok masyarakat tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan pemerintah, padahal pemerintah sering kali melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat tersebut. Selain itu pemicu ketidak lancarannya dalam menjalankan program kebersihan di dinas lingkungan hidup ini adalah terhambatnya dana dan kemampuan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta kebijakan pemerintah daerah yang belum mendukung serta kurangnya sosialisasi dan waktu yang terbatas.

5.2.6 Tanggapan informan mengenai kebersihan di Sekitar Kota Teluk Kuantan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan mengenai kebersihan persampahan dan kebersihan jalan kegiatannya meliputi pengangkutan sampah dan pembersihan jalan, di dalam hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan petugas kebersihan di Kota Teluk Kuantan sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik tetapi masih ada beberapa hambatan yang mereka temui sewaktu bekerja seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai persampahan dan faktor polusi udara seperti asap kendaraan bermotor yang mengakibatkan banyak debu dipinggiran jalan.

6.1 Kesimpulan



Berdasarkan hasil penelitian dilapangan mengenai Implementasi Program Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Terimplementasi dengan cukup baik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan agar Implementasi Program Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dapat terimplementasi dengan baik. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Pemerintah Agar lebih memperhatikan Sumber daya manusia karena dengan kurangnya sumber daya manusia suatu program tidak bisa menjalankan program dengan baik.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan dana untuk dinas lingkungan hidup dalam menjalankan programnya.
3. Kurangnya sarana dan prasarana menyebabkan terhambatnya dinas lingkungan dalam menjalankan suatu program sehingga pemerintah harus memperhatikan lagi mengenai sarana dan prasarana untuk dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi.
4. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan kebijakan daerah yang melibatkan masyarakat setempat sehingga mempermudah menjalankan setiap programnya.
5. Menindak para pengguna taman kota dan memberikan sanksi yang tegas kepada pengguna taman yang merusak taman kota.
6. Diharapkan kesadaran masyarakat agar jangan membuang sampah sembarangan
7. Pemerintah harus sering bersosialisasi kepada masyarakat agar dapat memberikan saran supaya masyarakat taat akan aturan.
- 8.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atep Adya Barata. (2003). *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Budiharjo Ir, Eko, Prof. M.S.C, *Kota dan Lingkungan*, United Nation, University Pers Jakarta, 2003.
- Dewi, Chisyanti Irra. 2011. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Salemba Empat: Jakarta
- Gordon, Siswanto. 2007. *Struktur Organisasi*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hakim, Rustam. 2010. *Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hayat. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara: Jakarta
- Moleong, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung
- Pedoman *Administrasi Negara* universitas Islam Kuantan Singingi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

- Rohman, Abd. 2018. *Dasar-dasar Manajemen Publik*. Penerbit Empatdua: Malang
- Soerjono Soekanto. 1993. *Kamus Sosioogi*, Jakara Raja Grafindo Persada
- Syafii, Inu Kencana. 2009. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. PT Bumi Aksara : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta : Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2013. *Ilmu Administrasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta : Bandung
- Sumarsono . 2003. *Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara: Jakarta
- Warwic, Arifin Tahir. 2015. *Implementasi Kebijakan*. PT Bumi Aksara :Bandung